

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap anak di Indonesia berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan pelecehan. Keberlangsungan pembangunan nasional dan kehidupan bangsa Indonesia di masa depan ditentukan oleh anak-anak yang sejahtera dan dijamin perlindungannya. Anak harus diberi kasih sayang dan diberikan perlindungan oleh keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Pada kenyataannya, anak yang harusnya disejahterakan dan dilindungi justru menjadi korban kekerasan dan *bullying*.

Tindak kekerasan pada anak tidak mengenal status, waktu, dan tempat. Keluarga termasuk orang tua kandung dapat melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak yang dilakukan dalam rumah tangga sering dianggap wajar sebagai upaya pendisiplinan anak oleh orang tua. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa posisi anak yang lemah sehingga tidak berani melapor atau mengadu. Di Indonesia, tindak kekerasan terhadap semakin meningkat dari tahun ke tahun, harus ada perhatian khusus dalam perlindungan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak. Berikut jumlah kekerasan anak di Indonesia pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2020 - 2022

No.	Jenis Kekerasan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Perempuan	8.810	70	11.389	71	13.514	76
2	Laki-Laki	3.600	30	4.525	29	4.127	24
Jumlah		12.410	100	15.914	100	17.641	100

Sumber: SIMFONI Pemberdayaan Pelayanan Perempuan dan Anak, 2023

Tabel 1.1 menggambarkan jumlah kekerasan anak di Indonesia tahun 2020-2022 yang tercatat, diketahui bahwa banyak kasus kekerasan yang memang tidak dilaporkan dan tidak tercatat. Sistem Informasi Online (Simfoni) yang berada di bawah naungan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendata bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 3.504 kasus atau 28,23% dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 1.727 kasus atau 10,85%. Perempuan lebih banyak mengalami tindak kekerasan daripada laki-laki yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang membentuk budaya dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari norma masyarakat yang menyatakan bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur segala sisi kehidupan dalam pasal dan aturan norma yang berlaku, namun hukum tersebut tidak dapat menjadi jaminan terciptanya suasana dan lingkungan yang ramah anak. Anak Salah satu hak anak yang penting untuk dipenuhi adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada kenyataannya terdapat kasus kekerasan dan *bullying* pada anak dalam lingkungan pendidikan yang mempengaruhi

kehidupan mereka, bahkan kekerasan dan *bullying* tersebut dilakukan tanpa sadar. Jumlah korban kekerasan berdasarkan pendidikan terlampir pada tabel 1.2, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan 2020 - 2022

No.	Jenis Kekerasan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tidak/Belum pernah sekolah	1.021	8.3	1.271	12,6	1.628	10
2	PAUD	153	1.3	150	1	96	0.6
3	TK	332	2.7	408	2,6	293	1.7
4	SD	3.549	28	4.127	25	4.996	28
5	SLTP	3.731	30	4.681	29	5.287	30
6	SLTA	2.455	19	3.161	19	3.328	18
7	Perguruan Tinggi	39	1	33	0.2	41	0.3
8	Lainnya	1.130	9.2	2.083	13	1.927	11
	Jumlah	12.410	100	15.914	100	17.641	100

Sumber: SIMFONI Pemberdayaan Pelayanan Perempuan dan Anak, 2023

Tabel 1.2 di atas menggambarkan korban kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang tercatat dalam SIMFONI, masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dan tercatat. Perlindungan tidak hanya dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat saja, tetapi perlu adanya perlindungan pada satuan pendidikan. Menurut Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), data KPAI tahun 2020-2022 menunjukkan terdapat kasus kekerasan dan *bullying* di satuan pendidikan dan sosial media. Perundungan di lingkungan sekolah berupa kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, dan

menjambak serta kekerasan psikis seperti menghina, merendahkan, meledek, dan diskriminasi kepada sesama teman kelas. (sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan>) diakses pada 10 Oktober 2023.

Upaya yang dilakukan pemerintah di berbagai negara sebagai komitmen untuk pemenuhan dan perlindungan anak yaitu mengeluarkan kebijakan. Guna mewujudkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melindungi anak-anak, pemerintah Indonesia membuat payung hukum dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan pemberian kesempatan hidup yang layak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Pemenuhan dan perlindungan hak anak juga dijamin dalam 17 tujuan SDGs yang merupakan tujuan global bagi seluruh negara dan pemangku kepentingan. Pemenuhan dan perlindungan anak tercantum pada tujuan ke 5 SDGs yaitu Kesetaraan Gender dan perlindungan perempuan/anak dengan 9 target dan 14 indikator. Pemerintah Indonesia menyerahkan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk turut menyusun peraturan daerah mengenai perlindungan anak. Semua provinsi di Indonesia harus menyusun kebijakan serta merancang keberjalanan pemenuhan hak-hak anak.

Salah satu provinsi yang memberikan prioritas terhadap perlindungan anak dan terpenuhinya hak-haknya adalah Provinsi Jawa Tengah. 31 dari 35

kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah ditetapkan ramah anak. Kategori penghargaan kota layak anak yaitu Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak (KLA). Kota Semarang mendapat penghargaan Nindya pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Kota Semarang juga telah menetapkan peraturan dan membentuk lembaga penyelenggara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, namun angka kekerasan dan *bullying* anak di Kota Semarang semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan Kota Semarang masih memiliki kekurangan dalam penanganan kekerasan dan *bullying* anak yang menjadi salah satu faktor Kota Semarang belum mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA). Jumlah anak di Kota Semarang yang menjadi korban kekerasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang

No.	Usia	2020		2021		2022	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	0-5	7	10	8	10	11	8,2
2.	6-12	24	34	24	30	60	44,1
3.	13-18	40	56	48	60	65	47,7
Jumlah		71	100	80	100	136	100

Sumber: ASIK PAK Kota Semarang, 2023

Tabel 1.3 dalam Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah kekerasan anak yang tercatat di Kota Semarang tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 9 kasus atau 12% dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 sebanyak 56 kasus atau 70%. Kasus kekerasan yang terjadi diantaranya yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak, anak dan balita yang ditelantarkan, anak berandalan, dan anak yang terkena masalah hukum.

Tidak hanya kekerasan yang masih banyak terjadi, *bullying* yang terjadi perlu menjadi perhatian pemerintah. Upaya menurunkan tindakan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah dilakukan melalui tindakan pencegahan. Terdapat beberapa pendekatan untuk menangani tindakan perundungan secara preventif, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi mengenai kesadaran akan risiko terkait dengan perundungan. Pemerintah memiliki tugas dan peran untuk mengutamakan perlindungan anak-anak dari kejahatan berbasis dunia maya dan kejahatan lingkungan, seperti pornografi, *bullying*, dan pelanggaran lainnya berbasis *cyber*. Selain melakukan upaya preventif untuk menghentikan perundungan, korban perundungan juga perlu mendapatkan penanganan terapi, salah satunya terapi intensif untuk membantu mereka mengatasi trauma yang dialaminya.

Penindasan sering terjadi di Kota Semarang, namun tidak tercatat atau bahkan tidak dilaporkan. Perundungan di sekolah kini melibatkan lebih dari sekadar siswa yang mengolok-olok satu sama lain. Perundungan atau *bullying* telah berkembang menjadi berbagai bentuk selama bertahun-tahun yaitu *bullying* verbal yang meliputi mengutuk, menggoda, membentak, mencela, *bullying* fisik meliputi mencubit, menjambak, menendang, memukul, mendorong, *bullying* sosial meliputi mengucilkan, diskriminasi, dan perundungan di dunia maya & media sosial (*cyberbullying*).

Banyak dampak buruk *bullying* terhadap kesehatan psikologis anak, prestasi akademis, dan kesehatan fisik. Secara fisik, perundungan dapat mengakibatkan luka fisik, secara permanen. Prestasi sekolah, baik akademis

maupun nonakademik, dapat terkena dampak negatif dari perundungan. Perundungan mengakibatkan menurunnya prestasi siswa yang menjadi korban. Dampak psikologis dari penindasan sangat bervariasi, bahkan hingga menimbulkan keinginan mengakhiri hidup (Waluyo, Adi, 2022 dalam <https://geberseпти.semarangkota.go.id/detailpost/proteksi-psikologis-bagi-peserta-didik-korban-perundungan-di-kota-semarang>).

Mayoritas bentuk *bullying* yang terjadi pada siswa SD adalah dibenci/dimusuhi, diambil uangnya, dikunci di kamar mandi, diancam, dipukul, dihina fisiknya, dan orangtua yang diejek. Siswa Sekolah Menengah Pertama yang terlibat dalam tindakan kekerasan menjadi sasaran perundungan, pencemaran nama baik, permusuhan, dan ejekan. Siswa Sekolah Menengah Atas mengalami perlakuan dijauhi teman dan sikap pilih pilih teman berdasarkan tingkat popularitas, kekayaan, dan lainnya. *Bullying* membuat korbannya menjadi resah, tidak bahagia, dan selalu tertekan. Dalam kasus tertentu bahkan dapat menimbulkan trauma yang berujung pada penolakan untuk bersekolah

Tingginya kasus kekerasan anak di ibukota dari Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjamin untuk melindungi anak dan menurunkan angka kekerasan anak di Kota Semarang. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk membuat satu lembaga khusus yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan anak, sehingga didirikanlah Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Rumah Revolusi Mental Duta Besar (RDRM) juga

merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada program ke 3 (tiga) yaitu Program Gerakan Indonesia Tertib dan berfokus pada poin h yang berupaya untuk menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas yang bebas kekerasan menjadi dasar tambahan dibentuknya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM).

Pengembangan dan pelaksanaan RDRM berlandaskan pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/35 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. Rumah Duta Revolusi Mental menjadi perwujudan keseriusan Pemerintah Kota Semarang untuk menurunkan jumlah fenomena kekerasan perempuan dan anak-anak. Tindakan preventif dan kuratif *bullying* serta kekerasan terhadap anak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sekaligus dalam rangka mendorong keberhasilan Kebijakan Kota Layak Anak guna menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak.

Pada awalnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) menjadi lembaga penyelenggara di bawah naungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang menjelaskan mengenai tugas, fungsi, peran, ketentuan koordinasi dan rapat rutin yang harus dilakukan, struktur organisasi, serta pembiayaan lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Pada pasal 2 ayat (3) huruf d, RDRM termasuk ke

dalam Lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak. Pada pasal 2 ayat (7) dijelaskan bahwa RDRM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung pencegahan, pemulihan pelaku tindak kekerasan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bertanggung jawab pada Walikota melalui Dinas. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan pergeseran tugas sehingga kini hanya fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dalam status sekolah dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Perundungan dan kekerasan pada satuan sekolah dapat membahayakan masa depan anak karena belajar dan bermain menjadi terganggu. Upaya untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami anak-anak korban perundungan yaitu melalui strategi pendekatan personal. Memprioritaskan kesan menyayangi dan mengasihi memungkinkan korban penindasan tidak khawatir dan cemas dalam berbagi cerita yang telah mereka alami merupakan kelebihan dari pendekatan personal. Tindakan *preventif* dan kuratif *bullying* tidak hanya ditujukan untuk korban saja, tetapi untuk pelaku dan semua orang yang terlibat. Didukung dengan pernyataan penyusun bantuan hukum RDRM, yaitu:

“Perilaku *bullying* bukan hanya antara pelaku dan korban, tetapi melibatkan pula penonton. Ketiga komponen yang saling terkait itu memiliki peran dalam terjadinya perilaku *bullying*. Teman sekelas yang hanya menjadi penonton, bersorak, dan yang tidak membantu melapor pada guru perlu dilakukan pendampingan psikologis juga. Guru dan kepala sekolah pun menjadi sasaran layanan psikologis untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman”

Rumah Duta Revolusi Mental telah mengatasi kasus kekerasan hingga anak-anak tidak mengalami trauma, tetapi dalam pencegahan kekerasan RDRM

masih memiliki kelemahan. Kurangnya penanganan dan pencegahan yang dilakukan karena keterbatasan jumlah pegawai dalam proses sosialisasi pencegahan kekerasan ke semua sekolah di Kota Semarang dan antrian yang cukup panjang. Banyaknya sekolah di Kota Semarang tidak sebanding dengan jumlah SDM unit RDRM, hanya beberapa sekolah yang telah terjangkau. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, jumlah sekolah di Kota Semarang semester 2023/2024 sebanyak 510 Sekolah Dasar dan 200 MTS/SMP. Sedangkan, pegawai Rumah Duta Revolusi Mental sebanyak 7 orang dengan rincian 4 konsultan, 2 psikolog dan 1 orang pengelola teknologi informasi sehingga kurang efektif dalam pencegahan kekerasan anak. Pernyataan tersebut didukung dengan keterangan dari penyusun bantuan hukum Rumah Duta Revolusi Mental yaitu:

“SDM di RDRM sangat terbatas, bisa dibayangkan jumlah SD dan SMP di Kota Semarang kan 500 lebih, tapi konsultan dan psikolognya hanya 6 orang. Jadi proses sosialisasi dan integrasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang cukup terkendala dan berjalan lambat”

Kurangnya SDM juga berdampak pada penyebaran informasi melalui website resmi RDRM tidak *up to date*. Informasi mengenai pergeseran tugas dan perkembangan RDRM tidak banyak diketahui publik karena penyebaran informasi tidak dilakukan secara berkala. RDRM mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui Instagram, sayangnya sosialisasi melalui media sosial tidak optimal. Instagram RDRM lebih banyak mengunggah dokumentasi kegiatan. Selain sosialisasi di media sosial, RDRM mengisi undangan menjadi narasumber di seminar dan webinar. Upaya tersebut

terus dilakukan dan tingkatkan agar penyebaran informasi tetap berjalan dan semakin meluas kepada masyarakat.

Koordinasi pelaksana RDRM dengan instansi lainnya sudah berjalan baik, dalam beberapa kasus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal menggunakan jalur informal untuk mempercepat tindakan. Koordinasi dilakukan melalui jalur informal dengan menghubungi pihak tertentu, lalu dilakukan secara formal untuk mengurus surat keterangan, surat izin, dan surat perintah. Hal tersebut karena penanganan kekerasan pada anak tidak dapat ditunda dalam waktu lama jika mengikuti prosedur hirarki. Koordinasi secara informal mempercepat penanganan pada korban dan pelaku kekerasan. Proses komunikasi antara masyarakat dan pihak RDRM berjalan baik. Pihak RDRM melayani secara daring dan luring menyesuaikan dengan jadwal dari orang tua yang mengakses layanan.

Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dibentuk di Kota Semarang sejak tahun 2017, namun jumlah kekerasan anak di Kota Semarang belum mengalami penurunan yang konsisten. Forum Anak Kota Semarang menjelaskan bahwa kekerasan di Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2022. Program pemerintah Kota Semarang dan Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dianggap belum mampu memberantas habis tindakan kekerasan dan *bullying* pada anak terutama dalam lingkungan pendidikan. Penyelesaian permasalahan ini juga memerlukan koordinasi yang baik dari para *stakeholders* di Kota Semarang.

Peneliti mengkaji efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan *Bullying* pada Anak karena terindikasi terdapat masalah berupa belum efektifnya lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang yang dibuktikan dengan meningkatnya angka kekerasan di Kota Semarang. Teori efektivitas organisasi membantu mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci yang mempengaruhi efektivitas lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dan memahami faktor pendukung dan penghambat organisasi secara keseluruhan. Teori efektivitas organisasi juga digunakan untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber milik organisasi yang mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut membantu memperoleh informasi mengenai kesuksesan dan kegagalan lembaga dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Pemerintah daerah harus terus mendorong pelaksanaan kinerja organisasi hingga mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kondisi aktual yang terjadi masih banyak anak-anak yang mendapatkan kekerasan dan *bullying*, yang tentunya kontradiktif dengan tujuan Kota Semarang yang ingin menciptakan sekolah dan mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA). Hal tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih Kota Semarang sebagai lokus penelitian.

Peneliti ingin mengetahui mengapa Kota Semarang yang telah menerapkan kebijakan, membuat regulasi dan mendirikan Lembaga

Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) masih belum dapat menurunkan kasus kekerasan dan *bullying* anak secara signifikan. Berdasarkan mempertimbangkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka *research question* penelitian ini yaitu Mengapa Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) belum dapat menurunkan angka Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak di Kota Semarang secara signifikan?

1.2 Identifikasi Masalah

Rumah Duta Revolusi Mental memiliki beberapa permasalahan yaitu:

1. Terbatasnya sumber daya manusia Rumah Duta Revolusi Mental untuk melakukan layanan dan kegiatan. Jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berjumlah 710 sedangkan konsultan di RDRM sebanyak empat orang dan psikolog sebanyak dua orang. Terbatasnya sumber daya manusia di RDRM menimbulkan antrian layanan yang cukup panjang dan menghambat terlaksananya program dan layanan RDRM. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Menurut informan pertama yaitu Bapak Adi Waluyo, S.Psi selaku Penyusunan Bantuan Hukum Rumah Duta Revolusi Mental:

“RDRM memiliki 7 orang pegawai dirasa tidak cukup karena selain mengatasi kekerasan, RDRM bertugas melayani anak-anak inklusi juga. Jika ditanya ideal ya variatif, tidak bisa mengukur secara kuantitatif. Jika bisa ditambah ya lebih baik.”

2. Tahap Pencegahan Kekerasan RDRM masih ditemukan banyak kendala karena sosialisasi yang tidak dapat menjangkau kepada semua sekolah di Kota Semarang. Proses sosialisasi dan integrasi dengan sekolah-sekolah di Kota Semarang belum optimal karena kurangnya SDM di Rumah Duta

Revolusi Mental. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Konselor Psikolog Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental yaitu Fitri Marshela, S.Psi menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi rutin belum terlaksana karena keterbatasan sumber daya, tetapi komunikasi dan integrasi dengan dinas terlaksana baik”

1.3 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah mengenai Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yaitu:

1. Apakah Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sudah efektif dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap skripsi ini dapat berkontribusi dalam memberikan informasi bagi pembaca serta dapat memberikan pengetahuan baru dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik terkait pemikiran akademis mengenai Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental khususnya dalam menganalisis Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Proses melakukan penelitian melibatkan pengembangan berbagai keterampilan, termasuk keterampilan analitis, kritis, dan pemecahan masalah yang telah diajarkan selama perkuliahan. Selain itu, peneliti juga belajar mengelola waktu, sumber daya, dan informasi dengan efisien yang menambah pengetahuan dan pengalaman dalam proses pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan saran bagi *stakeholders* terkait dalam pengambilan keputusan dan pengembangan isu pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan dan *Bullying* pada anak di Kota Semarang, khususnya di Rumah Duta Revolusi Mental.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam perbandingan dan pertimbangan dalam menemukan topik yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memahami landasan teori, metode, dan hasil temuan yang menjadi fokus penelitian. Dengan memahami penelitian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan orisinalitas penelitian dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini penelitian terdahulu dari beberapa jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas peneliti mengenai Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Marzellina Hardiyanti; Ani Purwanti; Dyah Wijaningsih (2018). “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang”	Mengkaji optimalisasi cara untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang melalui Rumah Aman sebagai penyedia layanan rujukan	Kualitatif	Meskipun telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku saat ini, namun penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui fasilitas layanan rujukan seperti Rumah Aman di Kota Semarang masih di belum optimal.
2.	Rahayu, Bety Agustina; Iman Permana (2019). “Bullying di Sekolah: Dasar Negeri	Menganalisis faktor-faktor perilaku bullying di Sekolah Dasar Negeri	Kuantitatif dan Kualitatif	Sebanyak siswa laki-laki, 42,16% termasuk dalam kategori perundungan verbal sedang, sementara

No	Nama/Judul/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kurangnya Empati Pelaku Bullying Dan Pencegahan”	Pungkuran Pleret Bantul.		39,22% cenderung melakukan perundungan fisik dalam jumlah minimal. Sebanyak 48,04% siswa laki-laki menjadi pelaku <i>bullying</i> relasional kategori sedang. Upaya pihak sekolah untuk menghindari perundungan dan kurangnya rasa empati terhadap pelakunya menjadi penyebab utama perundungan terjadi di sana. Ketidaktahuan adalah pemicu terjadinya intimidasi di kalangan siswa.
3.	Cascales; Rosario Ferrer. (2019). <i>“Effectiveness Of The TEI Program For Bullying And Cyberbullying Reduction And School Climate Improvement. International”</i>	Mengevaluasi keefektifan Program TEI, sebuah intervensi berdasarkan tutor sebaya, dalam pengurangan intimidasi dan cyberbullying, dan dalam perbaikan iklim sekolah	Kuantitatif (Quasi-experimen tal, sample 2.057 siswa Spanyol)	Setelah intervensi diterapkan, terdapat penurunan nyata dalam perilaku intimidasi, perkelahian, cyberbullying dan cybervictimization dalam kelompok pada teman sebaya. Program TEI berhasil menurunkan kasus perundungan dan perundungan siber sekaligus meningkatkan iklim baik di sekolah.
4.	Krisdyawati, Ajeng Resi; Yuniningsih, T. (2019). “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang”	Menjelaskan variabel-variabel yang mendorong dan menghambat kemampuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang dalam menangani situasi kekerasan terhadap anak.	Kualitatif	Efektivitas organisasi pada Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kota Semarang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum seperti yang diharapkan. Fasilitas pendukungnya cukup tersedia, namun masih mempunyai kendala pada

No	Nama/Judul/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				karakteristik lingkungan yaitu terbatasnya jumlah karyawan.
5.	Lina Muntasiroh (2019). “Jenis-Jenis Bullying dan Penanganannya di SD N Mangonharjo Kota Semarang”	Menjelaskan jenis <i>bullying</i> yang terjadi dari kelas III-VI SD Mangunharjo Kota Semarang yang terdiri dari sisi pelaku dan korban perundungan.	Kualitatif Deskriptif	Perundungan yang terjadi adalah bullying verbal berupa: mengejek nama orang tua, menyuruh, dan meneriaki. Perundungan fisik terdiri dari mendorong, menarik hijab, mencubit dan memukul. Penanganannya dilakukan dengan memberikan petunjuk setiap pagi, upacara, teguran dan hukuman yang bertujuan mendidik.
6.	Natika, Luki; Nuraida. (2020). “Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara)”	Menjelaskan permasalahan seputar kemampuan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam meningkatkan kemakmuran para nelayan.	Kualitatif Deskriptif	Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Stree, efektivitas operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang belum memuaskan karena ada nelayan yang memilih menjual hasil tangkapannya di luar Tempat Pelelangan Ikan.
7.	Siti Iba Iga Farida; Rochmani (2020). “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (<i>Bullying</i>) Anak Dibawah Umur”	Memaparkan kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku <i>bullying</i> anak di bawah umur	Kualitatif	Kurangnya undang-undang khusus yang mengatur mengenai penindasan telah menyulitkan penyelesaian permasalahan hukum pidana terkait tindakan pelaku intimidasi terhadap anak-anak yang menjadi

No	Nama/Judul/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				target kekerasan di sekolah.
8.	Utami, Cicilia Tanti Dkk. (2020) <i>“Bullying Survivors: The Dynamic Of Frequency, Forms Of Bully And The Response Of Survivors”</i>	Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kekerasan di sekolah dan menjelaskan bagaimana penyintas menanggapi dan mengatasi tindakan kekerasan	Kuantitatif	Banyak siswa yang mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan di SMA. Siswa yang sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan sebanyak 21 % dan sangat sering sebanyak 4,2%. Siswa yang mengaku melakukan bullying fisik sebesar 24,9%, melakukan bullying verbal sebanyak 86,4%, dan melakukan bullying sosial sebanyak 25,6%.
9.	Kibtyah, Maryatul; Ana Mawadda R.; Khabib Akbar M, (2021). <i>“The Implementation of Trauma Healing to The Bullying at Rumah Duta Revolusi Mental Semarang”</i>	Menguraikan bagaimana implementasi trauma recovery pada korban bullying di Rumah Duta Revolusi Mental di Semarang menggunakan kajian ajaran dan konseling Islam.	Kuantitatif	Implementasi dari trauma healing pada para korban bully pada Rumah Duta Revolusi Mental di Semarang memiliki dua bentuk program, yaitu: terapi konseling dan psikoterapi yaitu: terapi bermain, emosional, dongeng, dan menulis. Trauma healing memiliki 3 fase, yaitu fase awal, tengah, dan akhir atau fase pemutusan.
10	Singh, Balwinder. (2022). <i>“Child Abuse In Household & Schools In India: Legal Recourse To Rescue”</i>	Menganalisis di India dan menjelaskan konstitusi dan hukum bekal untuk anak	Kualitatif	Kekerasan dalam rumah tangga, seorang anak menderita dalam kedua kasus yang merupakan korban tidak langsung atau korban diam. Sedangkan di

No	Nama/Judul/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sekolah, kekerasan dapat berupa fisik atau mental. Pelecehan anak di dalam atau di luar rumah tangga merugikan untuk kesejahteraan akademik dan psikologis anak. Konstitusi India, yang berlaku pada tanggal 26 Januari 1950, jaminan hak anak-anak

Peneliti menggunakan beberapa jurnal rujukan yaitu jurnal “Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara)” digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam menjelaskan dimensi efektivitas RDRM yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu lokus penelitian dan fokus penelitian dimana jurnal membahas mengenai pengelolaan ikan di Kabupaten Subang, sedangkan penelitian ini menganalisis kekerasan dan *bullying* anak di Kota Semarang. Persamaannya yaitu terletak pada dimensi efektivitas organisasi dan metode penelitian yang digunakan.

Jurnal “Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang” sebagai acuan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas RDRM seperti karakteristik organisasi, lingkungan,

pekerja, dan manajemen dan strategi. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada dimensi efektivitas organisasi yang digunakan dan lokus (lembaga) penelitian. Persamaannya yaitu mengkaji mengenai korban kekerasan anak di Kota Semarang.

Jurnal "*The Implementation of Trauma Healing to The Bullying at Rumah Duta Revolusi Mental Semarang*" digunakan peneliti untuk mengetahui fungsi dan tugas RDRM dalam mengatasi kekerasan anak di Kota Semarang. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu penggunaan teori dasar, jurnal tersebut menggunakan teori implementasi sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas. Persamaannya yaitu mengkaji mengenai korban kekerasan anak di Kota Semarang, lokus penelitian dan metode penelitian.

Jurnal "Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang" digunakan peneliti untuk menambah sudut pandang serta pengetahuan mengenai kekerasan, *bullying*, dan penanganan kekerasan *bullying* pada anak di Kota Semarang. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu penggunaan teori inti, jurnal tersebut mengkaji optimalisasi dari SOP dan regulasi yang berlaku, sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas. Persamaannya yaitu mengkaji mengenai korban kekerasan anak di Kota Semarang dan metode penelitian.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa tidak ada duplikasi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa

penelitian terdahulu baik nasional maupun internasional di atas menjelaskan mengenai *bullying* dan kekerasan terhadap anak yang telah mengalami banyak perkembangan dengan diterapkannya banyak kebijakan dan dibentuknya unit khusus untuk lebih optimal melindungi anak dari kekerasan. Isu mengenai tingkat kekerasan dan *bullying* dikaji guna mengidentifikasi apakah unit/organisasi yang bertanggung jawab mencegah dan mengatasi kekerasan anak di Kota Semarang sudah optimal. Peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama persis mengkaji Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dengan teori efektivitas organisasi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat baru karena tidak ditemukan penelitian dengan fokus dan teori yang sama sehingga tidak ada unsur plagiarisme dalam penelitian ini.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi dapat didefinisikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit administrasi merupakan kegiatan tugas-tugas seperti membuat catatan, menulis surat, mengetik, pembukuan ringan, membuat agenda, dan tugas-tugas administratif lainnya. Secara luas, administrasi adalah kerja kolaboratif dua individu atau lebih menuju pencapaian tujuan tertentu secara efisien dan efektif. (Inu Kencana Syafii, 2006:13). Administrasi publik menurut Nicholas Henry merupakan perpaduan teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan ganda yaitu menumbuhkan kebijakan publik yang lebih peka pada keperluan sosial dan menumbuhkan pengetahuan pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat (Pasolong, 2008: 9).

Administrasi publik menurut Prajudi Atmosudirdjo yaitu pengelolaan negara sebagai organisasi dan administrasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan negara. Tujuan administrasi publik adalah menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan sumber daya organisasi, manusia, dan keuangan (Pasolong, 2008: 8). Menurut Yeremias T. Keban (2014:4), kata “administrasi publik” menggambarkan fungsi pemerintah yang diberi wewenang untuk merancang strategi baru demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Yeremias T. Keban (2014:3), Chandler dan Plano mendefinisikan Administrasi Publik sebagai tindakan pengelompokan dan integrasi sumber-sumberdan personel publik dalam rangka mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai keputusan kebijakan publik.

Berdasarkan opini para tokoh, disimpulkan bahwa Administrasi Publik adalah pencapaian tujuan pemerintah secara efisien dan efektif dengan berfokus pada pelayanan dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah oleh lebih dari dua orang atau lembaga yang melaksanakan bentuk kolaborasi atau kerjasama. Secara ringkas, administrasi publik dipandang sebagai sebuah prosedur yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah, mengarahkan kemampuan dan strategi-strategi, serta memberikan instruksi dan arah kepada banyak orang.

Teori Administrasi Publik digunakan dalam penelitian ini karena kegiatan yang dilakukan termasuk ruang lingkung Administrasi Publik serta terdapat proses dan dimensi Administrasi Publik. Hal tersebut merupakan cara

atau metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan melalui pemberian perlindungan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam proses Administrasi Publik itu sendiri. Layanan dalam mengatasi kasus kekerasan dan bullying pada anak di Kota Semarang melalui Rumah Duta Revolusi Mental yang menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini merupakan fokus dan lokus Ilmu Administrasi Publik juga. Oleh karena itu, teori Administrasi Publik dalam penelitian ini sangat penting.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Suatu teori seringkali berkembang atau berubah karena dianggap ketinggalan zaman dan tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Pada umumnya perkembangan tersebut disebut paradigma. Paradigma menurut Kuhn dalam Keban (2014:31) adalah suatu sudut pandang, seperangkat nilai, seperangkat metode, gagasan mendasar, atau pendekatan pemecahan masalah yang diterima oleh suatu masyarakat pada suatu titik waktu tertentu.

Fokus dan lokus merupakan dua kategori suatu bidang keilmuan seperti yang diungkapkan oleh Nicholas Henry. Fokus adalah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis persoalan, sedangkan Lokus adalah tempat metode atau cara tersebut digunakan. Menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014:31-33), dalam Administrasi Publik terdapat banyak paradigma yang didasarkan pada dua kategori tersebut, sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926).

Paradigma pertama atau yang sering disebut dengan teori Administrasi Publik klasik yang mulai berkembang pada abad 19 ketika Woodrow Wilson dan Frank Goodnow memisahkan antara politik dan administrasi. Dua peran utama pemerintah yang berbeda disebutkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam buku mereka "*Politics and Administration*". Pertama adalah peran politik, yang merumuskan kebijaksanaan dan kebijakan negara. Peran kedua adalah administratif, berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Paradigma Administrasi Publik lebih menegaskan pada fokus bidang studi yaitu metodologi atau kajian yang dipelajari dalam Administrasi Publik (isu-isu pemerintahan, politik, dan kebijakan), organisasi, pekerja, pendapatan dan belanja pemerintah. Pada paradigma pertama lokusnya masih belum jelas.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi atau *The Principles of Administration* (1927-1937)

Munculnya prinsip-prinsip administrasi sangat dipengaruhi oleh kuatnya pengaruh manajemen klasik dalam paradigma kedua administrasi publik ini. Tokoh terkenal yang dipengaruhi oleh Fayol dan Taylor antara lain Willoughby, Gullick, dan Urwick yang memperkenalkan bahwa fokus administrasi publik adalah prinsip-prinsip administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang universal dan dapat diterapkan secara luas. Inti dari prinsip-prinsip ini dapat terjadi di

berbagai lokasi, situasi, misi, kerangka kelembagaan, atau budaya dan tidak terbatas pada lokus tertentu, maka lokus paradigma ini tidak menjadi isu dan tidak cukup ditekankan. Paradigm ini tidak terlalu menekan lokus dan lebih berorientasi pada fokus.

3. Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik atau *Public Administration as Political Science* (1950-1970)

Upaya menetapkan kembali keterkaitan konseptual antar pemerintahan pada masa itu dilakukan dengan paradigma ketiga ini. Menurut John Gaus, Ilmu politik mendasari teori administrasi publik, Hal tersebut mendasari kembalinya administrasi ke Ilmu Politik sehingga terjadi pembaharuan dan perubahan lokus Administrasi Publik. Hasilnya, pada periode ini terjadi beberapa terobosan baru, termasuk munculnya perbandingan dan pertumbuhan administrasi dalam administrasi negara atau publik. Dalam paradig ketiga, terdapat dua kemajuan yaitu (a) studi kasus mulai digunakan, (b) munculnya pembangunan dan perbandingan administrasi yang kemudian masuk ke dalam bagian ilmu administrasi.

4. Administrasi Publik sebagai Manajemen atau *Public Administration as Management* (1956-1970)

James G. March, Herbert Simon, dan James D. Thompson, merupakan tokoh yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori paradigma keempat dengan mengemukakan gagasan bahwa teori organisasi merupakan landasan teori ilmu manajemen. Paradigma ini mengembangkan prinsip-prinsip pengelolaan secara

menyeluruh dan ilmiah. Paradigma ini berfokus pada pendekatan kuantitatif, analisis sistem, analisis manajemen, perilaku organisasi, dan sebagainya. Dua perkembangan dalam paradigma ini berorientasi pada ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Semua fokus dikembangkan ke dalam dunia administrasi publik, bukan hanya dunia bisnis saja sehingga lokus nya menjadi tidak jelas.

5. **Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik atau *Public Administration as Public Administration (1970an)*.**

Menurut para ahli seperti Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro, administrasi publik sudah mulai merumuskan sudut pandang yang berbeda dalam paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Telah terdapat gambaran jelas mengenai titik lokus dan fokusnya. Paradigma kelima ini berfokus pada praktik administrasi dan manajemen yang canggih, kebijakan publik, teori manajemen, dan teori organisasi. Kepentingan dan persoalan masyarakat, serta persoalan birokrasi pemerintahan, merupakan lokus administrasi negara. Paradigma kelima berbeda dari empat paradigma lainnya karena penekanan dan lokusnya didefinisikan lebih jelas.

6. ***Governance (1990)***

Cheema, G.S mengungkapkan bahwa paradigma *governance* merupakan paradigma terkini dari beberapa paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya dalam proses perkembangan Ilmu Administrasi Publik (Keban, 2014:37-33). Tiga pilar paradigma ini yaitu sektor publik,

sektor komersial, dan masyarakat. Hal yang membedakan paradigma ini dengan paradigma lain yaitu paradigma keenam ini memaparkan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Paradigma ini berkembang ke arah tata kelola yang baik, yang konsisten dengan adanya peralihan dari pemerintahan (*government*) ke tata kelola (*governance*) dan menggambarkan bagaimana masyarakat sipil, sektor bisnis, dan pemerintahan yang stabil terintegrasi. Administrasi publik merupakan ilmu yang telah berkembang tidak terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi telah memperhatikan berbagai jenis organisasi, khususnya pada pelaksanaan mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan publik.

Beberapa dimensi penting dalam *governance*, dimensi pertama adalah struktur kelembagaannya, yang mencakup sejumlah besar pelaku kebijakan. Oleh karena itu, jaringan pemain dan jenis kemitraan lainnya merupakan hal yang lazim dalam *governance*. Dimensi kedua yaitu nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan publik. Seiring dengan berkembangnya dimensi kedua ini, lahirlah tata kelola yang demokratis (*democratic governance*) yang menekankan kesetaraan, partisipasi, dan pengelolaan secara sosial. Dimensi ketiga yaitu prosedur yang menguraikan sistem elemen masing-masing lembaga publik dan cara menangani keluhan dan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam yaitu paradigma *Governance* karena efektivitas organisasi RDRM mencoba menjelaskan berbagai unsur dan lembaga terkait yang memberikan respon terhadap permasalahan publik, dimana masalah publik dalam kasus ini adalah kasus kekerasan dan bullying pada anak. Fokus penelitian yang digunakan adalah organisasi yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi kekerasan dan bullying pada anak, sedangkan lokusnya adalah Kota Semarang. Penelitian ini juga masuk ke dalam paradig *governance* karena meliputi dimensi *governance* yaitu dimensi kelembagaan, dimensi nilai, dan dimensi proses.

1.6.4. Manajemen Publik

Pada dasarnya manajemen adalah penggerak administrasi publik, maka manajemen memainkan peran penting dalam sistem Administrasi Publik. Manajemen berasal dari kata bahas Inggris "*management*" yang merupakan bentuk kata benda dari kata "*to manage*", yang bermakna mengelola. Manajemen merupakan prroses merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan sukses dan ekonomis (Husaini, 2014: 7). Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi semuanya merupakan pemaknaan dari manajemen (Ibrahim, 2013:19). Manajemen diterjemahkan sebagai "*The art of getting finish through people*" yaitu seni menyelesaikan tugas melalui orang lain oleh Lauren A. Aply (Eri Susan, 2019: 953).

Luther Gulick, memandang manajemen sebagai cabang studi yang secara sistematis mencari alasan dan cara memahami mengapa dan bagaimana

individu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan sistem kerja sama yang memberikan manfaat. Publik memiliki banyak definisi dan konsep yang bergantung pada sudut pandang ahli yang mendefinisikan. Menurut Poerwadiminta dalam (Satibi, 2012, p. 11), publik memiliki banyak makna yaitu: (1) orang banyak serta masyarakat dan rakyat yang bersifat umum dan (2) rakyat. Tangkilisan dalam (Satibi, 2012, p. 12), memaparkan tiga konsep yang berhubungan dengan istilah publik yaitu masyarakat, negara, dan umum (sesuatu/sekelompok orang yang bersifat tidak perseorangan).

Manajemen publik merupakan bidang studi interdisipliner yang berfokus pada elemen organisasi secara umum yang menggabungkan sumber daya politik, keuangan, manusia, dan fisik dengan tanggung jawab manajemen termasuk *planning*, *organizing* dan *controlling*. Overman berpendapat bahwa “*policy analysis*” dan administrasi publik yang menyoroiti masalah-masalah antara orientasi kebijakan politik dan orientasi instrumental-rasional tidak termasuk dalam definisi manajemen publik (Keban dalam Satibi 2012:14). Manajemen publik oleh Pasolong dimaknai sebagai “manajemen instansi pemerintah” yang mengandung makna umum, tetapi intinya berkaitan dengan kepada dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengelola organisasi pemerintah atau lembaga publik (Satibi, 2012, p. 14).

Manajemen Publik dan Administrasi Publik hanya memiliki garis perbedaan yang tipis. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Shafritz bahwa kebijakan publik dan manajemen publik merupakan dua aspek administrasi publik yang saling tumpang tindih (Satibi, 2012).

Manajemen publik berbeda dengan administrasi publik karena manajemen benar-benar merupakan pengaturan yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau memfasilitasi kinerja aktor pemerintah melalui penataan organisasi. Strategi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal serta misi dan tujuan organisasi menjadi fokus utama Manajemen Publik (Krisdyawati, A., 2018). Adapun beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan efektivitas pelaksanaan manajemen publik yaitu: akuntabel, transparan, responsive, efektif, efisien, adaptif, rasional, dan professional (Satibi, 2012, pp. 24-26).

Kesimpulan dari definisi manajemen publik menurut para ahli yakni manajemen publik adalah ilmu pengetahuan, rencana, dan prosedur kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya termasuk manusia secara optimal melalui kolaborasi antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen sangat berperan dalam Administrasi Publik, terutama dalam rangka merumuskan visi-visi kebijakan/strategi, rencana, program dan berbagai skala sesuai kebutuhan.

Hubungan antara manajemen publik dan efektivitas organisasi merupakan hal penting dalam bidang administrasi publik dan manajemen. Manajemen publik yang efektif melibatkan penggunaan bukti dan data untuk menginformasikan keputusan. Dengan menggunakan pendekatan yang terukur dan didasarkan pada data, manajemen publik dapat mengidentifikasi kebijakan, program, atau praktik yang paling efektif dalam mencapai tujuan organisasi yang menjadi tolak ukur efektivitas. Kepemimpinan yang baik dalam konteks manajemen publik sangat penting untuk mencapai efektivitas organisasi.

Pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memandu staf dalam mencapai tujuan organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia maupun peralatannya disebut manajemen.

1.6.5. Efektivitas

Menurut etimologinya, istilah efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris “*effective*” yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Efektivitas menunjukkan kesesuaian atau keberhasilan. Efektif adalah istilah dasar, dan efektivitas adalah kata sifatnya. Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi dana, batasan waktu, dan jumlah pegawai (Luki Natika, 2020: 4). Efektivitas berkorelasi dengan tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai.

Efektivitas menurut Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, atau kegiatan suatu organisasi atau sejenisnya tanpa merasa tertekan atau mengalami konflik ketika melakukannya. Berdasarkan perspektif tersebut, efektivitas adalah titik di mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Hubungan antara keluaran dengan tujuan merupakan hal yang dikaji dalam efektivitas. Suatu organisasi, program, atau kegiatan akan semakin berhasil jika outputnya semakin berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. Peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya,

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target tertentu dengan memperhatikan gejala lingkungan yang timbul.

1.6.6. Organisasi dan Lembaga Penyelenggara

Organisasi memiliki banyak pengertian karena para ahli melihat organisasi dari sudut pandang yang berbeda, tetapi pengertian organisasi memiliki kesamaan yang esensial. Terdapat beberapa pengertian organisasi dari para ahli dalam Sari E. (2007:3) yaitu:

1. Suatu bentuk perkumpulan manusia yang berserikat untuk mencapai tujuan bersama (James D. Money)
2. Suatu sistem terstruktur yang mencakup lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan bersama (Chester I. Banard)
3. Bentuk perserikatan sekelompok manusia yang terikat secara formal dalam hubungan hirarki yang memiliki tujuan sama, dimana dalam hubungan hirarki tersebut terdapat sekelompok orang menjadi pemimpin dan sekelompok orang menjadi pegawai (Sondang P.Siagian)

Berdasarkan pengertian para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah suatu perkumpulan manusia yang bersifat formal dan hirarki yang secara bersama sama mencapai tujuan organisasi atau menyelesaikan suatu tugas.

Menurut Prastowo (2020:18), lembaga adalah sebuah entitas atau organisasi yang memiliki status formal dan diakui secara resmi dalam suatu sistem sosial, politik, atau hukum. Lembaga dapat memiliki berbagai fungsi, peran, dan tujuan dalam masyarakat, dan sering kali memiliki pengaturan dan

aturan yang mengatur operasinya. Lembaga biasanya diakui secara resmi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam suatu negara atau sistem hukum. Lembaga penyelenggara adalah entitas yang bertanggung jawab secara khusus atas penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu kegiatan atau layanan (Sari E., 2006, pp. 5-7). Lembaga penyelenggara biasanya diatur oleh aturan, peraturan, atau hukum yang mengatur operasinya. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap standar etika, hukum, dan prosedur yang relevan. Lembaga penyelenggara sama seperti organisasi yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir, dengan hierarki, peran, dan tanggung jawab yang jelas bagi anggotanya. Struktur organisasi ini membantu lembaga dalam mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif.

Terdapat perbedaan antara lembaga penyelenggara dan organisasi yaitu:

1. Lembaga Penyelenggara:

- a. Fokus pada pelaksanaan: Lembaga penyelenggara menekankan pada penyelenggaraan atau pelaksanaan kegiatan atau layanan tertentu. Hal tersebut karena lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab khusus dalam menyelenggarakan suatu layanan atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau mandatnya.
- b. Tanggung jawab khusus: Lembaga penyelenggara seringkali memiliki tanggung jawab yang ditetapkan secara khusus dalam mengelola dan menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat atau pihak yang terkait. Contoh: Rumah sakit, sekolah, universitas, perpustakaan, lembaga penelitian, dan lembaga pelayanan sosial adalah contoh

lembaga penyelenggara yang berfokus pada penyediaan layanan atau kegiatan tertentu.

2. Organisasi

- a. Struktur Formal: Organisasi mengacu pada entitas yang terstruktur dengan tujuan tertentu, kebijakan, dan tata kelola yang ditetapkan. Organisasi dapat berupa badan usaha, badan pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau entitas lainnya yang memiliki anggota atau karyawan.
- b. Tujuan yang Beragam: Organisasi dapat memiliki berbagai jenis tujuan, termasuk tujuan komersial, tujuan sosial, tujuan pendidikan, dan lain-lain. Fokus utama organisasi mungkin tidak selalu terbatas pada penyelenggaraan suatu layanan atau kegiatan tertentu.

Perbedaan utama antara lembaga penyelenggara dan organisasi adalah bahwa lembaga penyelenggara menekankan pada pelaksanaan layanan atau kegiatan tertentu dengan tanggung jawab khusus, sedangkan organisasi mengacu pada entitas yang lebih luas dengan struktur formal dan tujuan yang mungkin lebih beragam. Namun, dalam beberapa konteks, lembaga penyelenggara dapat menjadi bagian dari sebuah organisasi yang lebih besar. Rumah Duta Revolusi Mental merupakan lembaga penyelenggara karena Rumah Duta Revolusi Mental memiliki tugas dan tujuan khusus atas pelaksanaan suatu kegiatan atau layanan kekerasan dan *bullying* anak di Kota Semarang. RDRM bukan merupakan organisasi independen yang memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan sendiri, melainkan harus memiliki izin dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan karena RDRM

bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang.

1.6.7. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi adalah keterampilan organisasi dalam mengoptimalkan semua sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dengan tujuan mencapai target organisasi (Sari E., 2006, p. 62). Dalam Pasolong H. (2010:4) terdapat beberapa pendapat mengenai efektivitas organisasi yaitu efektivitas organisasi menurut Robbins adalah tingkat kinerja yang dicapai organisasi yang dipengaruhi oleh struktur, orang, dan kelompoknya. Menurut Keban, jika suatu organisasi mencapai prinsip atau tujuan yang digariskan dalam visi, maka organisasi tersebut dapat dianggap efektif. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh, efektivitas organisasi merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi guna mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan sebelumnya.

Mayoritas para ahli membahas mengenai efektivitas hanya dari gejala yang ada dalam lingkungan organisasi. Efektivitas tidak jauh dari pembahasan pencapaian tujuan, prestasi kerja, dan produktivitas. Hal tersebut menggambarkan stagnansi perkembangan model-model efektivitas organisasi karena pembaharuan kajian mengenai ukuran efektivitas organisasi yang dikemukakan para ahli tetap menyamakan efektivitas dengan produktivitas. Pada kenyataannya efektivitas organisasi tidak selalu mengejar produktivitas semata, walau keduanya saling berhubungan.

Pengukuran efektivitas sulit dilakukan karena tokoh yang menafsirkan dan menilai efektivitas bergantung pada pen definiannya sendiri. Menilai antara rencana dengan hasil aktual yang dicapai adalah cara untuk mengukur efektivitas. Sesuatu dianggap tidak efektif apabila usaha dan hasil pekerjaan tidak sesuai serta tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Faktor terpenting yang memengaruhi efektivitas organisasi adalah struktur organisasi.

1.6.8. Dimensi Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi dapat didefinisikan sebagai seberapa baik kinerja organisasi dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Efektivitas merupakan istilah luas yang mencakup beberapa aspek internal dan eksternal. Menurut Gibson dalam Febriani, Eka dkk (2022:475) terdapat tiga dimensi efektivitas organisasi pada Pendekatan Sistem (*System Approach*) yaitu:

1. Input: Melibatkan semua sumber daya yang masuk ke dalam organisasi, termasuk manusia, uang, peralatan, informasi, dan sumber daya lainnya.
2. Proses: Efektivitas organisasi dalam hal proses dapat diamati dari sejauh mana organisasi mampu menjalankan proses-proses ini secara efisien, konsisten, dan dengan kualitas yang baik.
3. Output: Efektivitas organisasi dalam hal output dapat diamati dari sejauh mana organisasi mampu mencapai hasil yang diharapkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

4. Umpan Balik (Feedback): Efektivitas organisasi dapat diamati dari sejauh mana organisasi mampu merespons umpan balik ini dengan cepat, fleksibel, dan dengan cara yang memperbaiki kinerja organisasi.
5. Lingkungan (Environment): Efektivitas organisasi dalam hal lingkungan dapat diamati dari sejauh mana organisasi mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya dengan baik.

Menurut Tangkilisan dalam (Hidayat, T. 2022:4943) terdapat lima dimensi efektivitas yaitu:

1. Produktivitas: Produktivitas merujuk pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan output atau hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa organisasi mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan jumlah sumber daya yang sama atau lebih sedikit.
2. Kemampuan Adaptasi atau Fleksibilitas: Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas merujuk pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Organisasi yang dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul.
3. Kepuasan Kerja: Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan atau kepuasan karyawan terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan semangat karyawan, produktivitas, dan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

4. Kemampuan Berlaba: Kemampuan berlaba mengacu pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang memadai dari operasi bisnisnya. Organisasi yang mampu menghasilkan laba yang stabil dan berkelanjutan memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan masa depan.
5. Pencarian Sumber Daya: Pencarian sumber daya mencakup upaya organisasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ini termasuk sumber daya finansial, manusia, teknologi, dan fisik yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pertumbuhan organisasi.

Dimensi efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985:53), yaitu:

1. Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan merupakan semua usaha yang dilakukan untuk mencapai target melalui pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi dan pengelolaan hambatan. Evaluasi efektivitas organisasi besar kecilnya bertumpu pada pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan berkaitan dengan proses perencanaan tujuan hingga upaya untuk memaksimalkan tujuan. Pencapaian tujuan dikatakan sukses apabila dapat menghindari sejumlah hambatan yang timbul. Saat proses perencanaan tujuan jika hambatan ini diketahui dan diperhitungkan, maka dapat ditentukan tujuan yang dapat dicapai secara optimum (Steers, 1985:5). Tujuan harus dibuat bukan secara maksimal tetapi secara realistis, semakin objektif setiap tujuan maka semakin tinggi pencapaian tujuan. Saat proses upaya pencapaian tujuan,

jika hambatan dikelola dengan baik maka hasil dan target yang diharapkan dapat tercapai. Pencapaian tujuan dipengaruhi oleh beberapa fakto yaitu:

- a. Proses perumusan tujuan
- b. Optimalisasi tujuan

2. Integrasi

Integrasi berasal dari kata '*integrate*' yang merupakan bahasa Latin, berhubungan dengan kesatuan bentuk atau suatu keseluruhan. Integrasi organisasi berkenaan dengan koordinasi, komunikasi, kesepakatan, peningkatan persetujuan di lingkungan internal dan eksternal organisasi (Steers, 1985:63). Integrasi efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menggabungkan dan menyusun berbagai komponen dan proses agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integrasi organisasi yaitu: Prosedur kegiatan dan Proses dalam sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi berasal dari bahasa Latin *adaptare*, yang berarti untuk menyesuaikan. Adaptasi organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengubah standar operasinya menyesuaikan dengan lingkungan yang mengalami perubahan serta untuk menghindari kekakuan organisasi atas rangsangan lingkungan (Steers, 185:48). Adaptasi efektif organisasi melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan yang diperlukan dengan cepat dan efisien untuk tetap relevan di pasar atau lingkungan yang berubah. Perubahan ini tidak terjadi pada sistem

organisasi saja, tetapi pada penyesuaian diri anggota organisasi untuk menelaraskan dengan perubahan lingkungan. Adaptasi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: peningkatan kemampuan, dan inovasi.

Peneliti menggunakan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk menganalisis efektivitas lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental karena ketiga dimensi ini mencakup aspek-aspek penting dari keberjalanan organisasi. Pencapaian tujuan mengukur sejauh mana organisasi mencapai hasil yang diinginkan, sementara integrasi mengukur sejauh mana organisasi dapat menyatukan berbagai bagian atau unit untuk mencapai tujuan bersama. Adaptasi mengukur kemampuan organisasi untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang berubah. Dengan menggunakan ketiga dimensi ini, peneliti dapat menganalisis pertumbuhan jangka panjang, pembagian tugas dan peran yang jelas, peran manajer, dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam pencegahan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* anak di Kota Semarang.

1.6.9. Faktor Pendukung dan Penghambat

Menurut Richard M. Steers (1985:209-216) terdapat 4 (empat) ciri yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Ciri Organisasi

Ciri organisasi yang memengaruhi efektivitas organisasi yaitu teknologi dan struktur organisasi. Teknologi berkaitan dengan proses

penggabungan mekanis dan intelektual manusia dalam organisasi untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi. Efektivitas semakin meningkat jika pegawai (sumber daya organisasi) dapat mengoperasikan teknologi. Struktur merupakan cara menempatkan sumber daya manusia ke dalam koneksi yang relatif stabil, dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku berorientasi tugas, koordinasi, dan komunikasi.

Struktur dalam organisasi berfungsi untuk mengatur pegawai dalam berbagai kegiatan menuju tujuan organisasi. Struktur organisasi merujuk pada tingkat desentralisasi yaitu partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan, kemampuan organisasi membagi jumlah pekerjanya ke dalam bagian-bagian, formalisasi yaitu pengelolaan kerja pegawai melalui peraturan dan prosedur yang formal atau resmi.

2. Ciri Lingkungan

Pengaruh lingkungan dibedakan ke dalam dua kategori yaitu lingkungan dalam (internal) dan lingkungan luar (eksternal). Lingkungan internal sering disebut dengan iklim organisasi. Menurut Payne iklim organisasi adalah seperangkat nilai, sikap, norma dan perasaan pegawai akibat dari kegiatan organisasi sehingga dapat memengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Iklim organisasi yang baik diukur dari tekanan pada prestasi, status, semangat, dan pengembangan dan pelatihan pegawai.

Lingkungan luar meliputi faktor-faktor yang berada di luar batas organisasi seperti kondisi ekonomi, politik, bencana global dll. Lingkungan

luar berkaitan dengan tingkat keterdugaan situasi lingkungan, yaitu kemampuan organisasi untuk mengetahui kondisi lingkungannya di masa depan, persepsi keadaan lingkungan yaitu ketanggapan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap kerumitan dan ketidakpastian organisasi dan tingkat rasionalitas organisasi yaitu kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan dan cara bertindak sebagai respon dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi.

3. Ciri Pekerja

Peran individu memengaruhi prestasi kerja dan akhirnya berpengaruh juga terhadap keberhasilan dan kegagalan organisasi. Para pekerja yang membentuk struktur organisasi, mengoperasikan teknologi dan memberikan tanggapan pada keadaan lingkungan. Ciri pekerja adalah faktor utama yang memengaruhi efektivitas. Sarana pokok agar karyawan sukarela memberikan dukungan dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu melalui menggabungkan tujuan pribadi dan organisasi. Pegawai yang meningkatkan usaha untuk mencapai tujuan pribadi dengan kinerja di dalam organisasi, maka akan mendorong efektivitas organisasi tersebut.

Perilaku pegawai agar mampu mencapai keberhasilan hingga akhir bergantung pada beberapa faktor yaitu kejelasan peranan dan prestasi kerja, organisasi harus paham bahwa pekerja melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan di bidangnya, pegawai harus spontan dan inovatif, individu harus dapat bertindak, memanfaatkan kesempatan, dan membuat keputusan sendiri dengan mempertimbangkan alternatif yang terbaik bagi

perusahaan, dan keterikatan pada organisasi, yang dibagi menjadi dua keterikatan (*attachment*) dan keikatan (*commitment*). Keterikatan berkaitan dengan cara organisasi untuk mempertahankan pegawainya dari pengunduran diri. Pegawai bertahan hanya karena ingin mempertahankan keanggotannya saja. Keikatan berkaitan dengan ketertarikan individu pada tujuan, nilai dan sasaran organisasinya (Steers, 1985:136).

4. Praktik dan Kemampuan Manajemen

Praktik dan kemampuan manajemen merujuk pada peran manajer dalam mendorong efektivitas organisasi. Kemampuan Manajemen merupakan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengatur semua elemen organisasi melakukan setiap kegiatan guna mencapai efektivitas organisasi. Manajer memiliki tugas untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktek dasar organisasi. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam setiap keadaan merupakan ciri pemimpin yang baik. Kualitas pemimpin sangat berhubungan erat dengan kualitas keputusan yang diambil. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas organisasi yaitu:

- a. pemanfaatan sumberdaya, kemampuan organisasi mengintegrasikan berbagai subsistem, penetapan, penerapan dan pemeliharaan pedoman kebijakan, dan sistem pengendalian organisasi untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan organisasi.

- b. proses komunikasi, proses komunikasi merupakan instrument untuk mengkoordinir dan memusatkan kegiatan pekerja ke tujuan dan sasaran organisasi. Jika arus, ketepatan dan penerimaan komunikasi relevan, maka tingkat ketidakpastian akan rendah. Komunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping;
- c. kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kemampuan pemimpin dapat membedakan antara organisasi yang efektif dan tidak efektif. Kepemimpinan berfungsi untuk mengkoordinir unit-unit organisasi yang berbeda, mengarahkan pada penyelesaian tugas, dan menjaga stabilitas organisasi. Ciri utama kepemimpinan efektif adalah kemampuan pengambilan keputusan yang tepat dan dapat diterima.

1.6.10. Kekerasan dan *Bullying*

Kekerasan dan *bullying* merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait. *Bullying* dalam Bahasa Indonesia berarti perundungan. *Bullying* termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan. Kekerasan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup terjadi dan pelaku serta korban kekerasan seperti kekerasan dalam hubungan percintaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kekerasan di kantor antara pemimpin dengan pegawai atau pegawai dengan pegawai, kekerasan dalam lingkungan pendidikan dan bentuk kekerasan lainnya dalam masyarakat. Sebaliknya, istilah *bullying* banyak digunakan atau terkenal di lingkungan pendidikan yang biasanya pelaku dan korbannya merupakan siswa sekolah.

Bullying berasal dari bahasa Inggris *bull* yang berarti banteng. Menurut etimologinya, kata *bully* bermakna seseorang yang mengganggu pihak lemah atau penggertak. Terdapat beberapa pengertian *Bullying* menurut para ahli dalam Pangabean, Herlina dkk (2023:10-11). Pertama menurut Olweus, *bullying* merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan atau kekuasaan yang sengaja dilakukan oleh individu atau sekumpulan orang secara berulang-ulang dalam waktu yang lama terhadap pihak yang lemah selaku korban sehingga tidak dapat mempertahankan dirinya.

Kedua, *bullying* diartikan oleh Sejiwa sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuatan fisik dan mental yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap korban yang tidak berdaya untuk membela diri. Ketiga, *bullying* didefinisikan oleh Wicaksana sebagai penganiayaan fisik dan psikis yang terus-menerus yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap korban yang tidak mampu menyelamatkan diri, dengan tujuan untuk menyakiti, memberikan rasa takut, atau kesedihan pada korban. *Bullying* didefinisikan sebagai agresi yang dilakukan dalam jangka waktu lama oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lebih lemah, yang mengakibatkan cedera fisik dan psikologis.

Istilah kekerasan berkaitan dengan sebuah perilaku menggunakan kekuatan kepada orang lain yang bersifat menyerang atau bertahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai perilaku apa pun yang

mengancam, memaksa, dan merampas kebebasan hukum, anak-anak atau menyebabkan mereka menderita secara fisik, seksual, mental, atau ditelantarkan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pasal 6 hingga Pasal 13, bentuk Kekerasan diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu:

1. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti pemukulan, pemukulan, penganiayaan, perkelahian, kerja paksa tanpa upah atau upah minimum, dan pembunuhan yang melibatkan pelaku melakukan kontak fisik dengan korban, baik menggunakan alat maupun tidak.
2. Kekerasan psikologis, yaitu tindakan non-fisik yang dimaksudkan untuk menimbulkan ketidaknyamanan, rasa malu, dan penekanan perasaan termasuk pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, menyebarkan rumor, dan ejekan.
3. Perundungan adalah ketika pihak yang lebih kuat secara konsisten menggunakan kekerasan fisik dan psikologis terhadap pihak yang lebih lemah.
4. Kekerasan seksual yaitu perilaku yang merendahkan, menghina dan melecehkan bahkan menyerang bagian tubuh dan fungsi reproduksi seseorang sehingga menyebabkan penderitaan pada fisik, psikis, fungsi reproduksi, kesehatan dan kehilangan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang nyaman dan aman. Kekerasan seksual meliputi melecehkan

tampilan fisik, kondisi tubuh, rayuan, mengirim pesan seksual, dan merekam serta menyebarkan video dan foto secara seksual tanpa izin.

5. Diskriminasi dan intoleransi adalah sikap pembedaan dan pengecualian yang bersifat SARA seperti melarang mengikuti perayaan hari keagamaan, pemaksaan mengamalkan ajaran agama tertentu dan menghalangi peserta didik untuk menerima hak nya di sekolah.
6. Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang kemungkinan dapat menyebabkan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan.
7. Bentuk Kekerasan lainnya seperti *Cyberbullying* yaitu perundungan yang menggunakan teknologi, biasanya dilakukan di dunia maya. Perundungan ini meliputi kekerasan psikis yang dilontarkan melalui dunia maya.

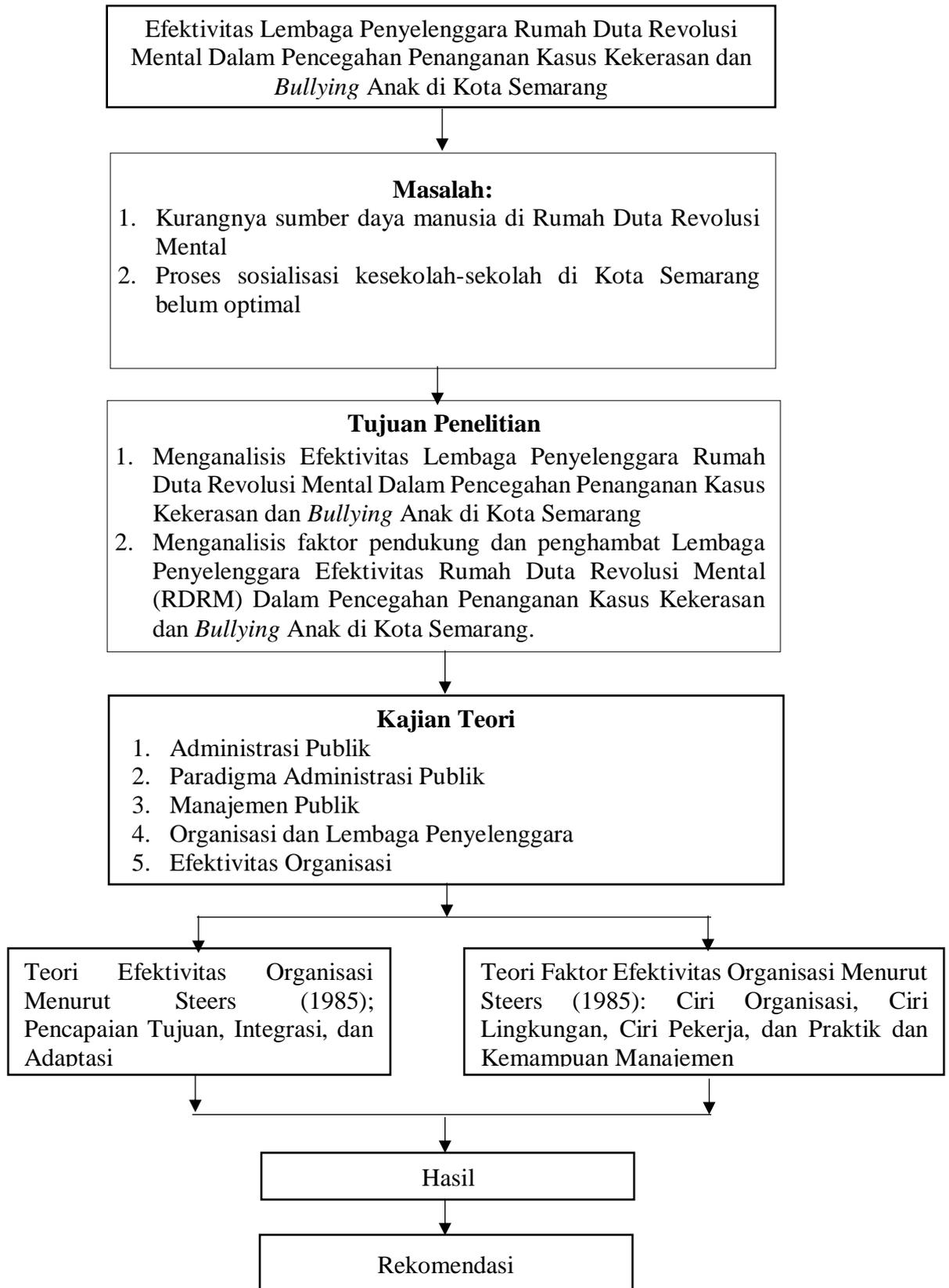
Perundungan dapat menyebabkan trauma bagi para korban, terdapat beberapa akibat negatif perundungan yaitu:

1. Takut sehingga menolak berangkat sekolah, korban cenderung akan menghindari hal-hal yang membuatnya merasa sakit tidak nyaman
2. Prestasi akademik menurun, rasa takut dan tidak nyaman yang berlebihan akan memecah fokus korban terhadap materi pelajaran
3. Merasa tidak dihargai di lingkungan sekitar, perilaku buruk yang dilakukan pelaku dan tidak adanya seseorang yang membantu untuk melindungi korban membuat korban tidak merasa dihargai dan berpikir bahwa korban pantas menerima perlakuan tersebut

4. Korban bullying yang terlalu parah tidak dapat mengendalikan perasaan dan emosinya akan melampiaskan emosi dan rasa takutnya kepada orang lain dengan melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk pembalasan atau pelampiasan.
5. Memiliki masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, rendah diri, sulit tidur, keinginan menyakiti diri, atau pikiran untuk bunuh diri

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dibentuk karena ketiadaan unit atau organisasi khusus untuk menangani kasus kekerasan anak yang semakin tinggi di Kota Semarang. Terbitnya instruksi presiden no 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental terutama dalam poin h, yang berupaya untuk menciptakan tempat kerja, lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas yang bebas kekerasan pun menguatkan alasan didirikannya Rumah Duta Revolusi Mental. Pembentukan RDRM didukung dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor: 463/35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang sebagai lembaga perlindungan anak dari tindak kekerasan dan *bullying* di Kota Semarang. Peneliti menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Richard M. Steers. Peneliti mencoba merumuskan kerangka berpikir dengan mengacu pada tujuan penelitian dan teori yang digunakan yang terdapat pada Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep menjelaskan cara tertentu yang digunakan dalam penelitian, sehingga peneliti lain dapat mengembangkan cara yang lebih baik atau menerapkan pengukuran dan prosedur yang sama. Operasionalisasi konsep memperjelas apa yang akan diselidiki oleh peneliti dalam mendeskripsikan persoalan di lapangan sebagai subjek penelitian. Peneliti mengkaji Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang. Kemudian dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi menggunakan ciri organisasi yang efektif. Berikut penjelasan secara rinci:

1. Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental

Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental adalah kemampuan Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam mencapai tujuan, sasaran dan menggunakan sumber daya lembaga untuk percepatan pencapaian tujuan. Terdapat 3 (tiga) dimensi efektivitas organisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas Lembaga Penyelenggara RDRM dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang, yaitu:

a. Pencapaian Tujuan.

Pencapaian tujuan dilihat proses perencanaan tujuan yaitu landasan dasar tujuan strategis, upaya optimalisasi tujuan dan keselarasan tujuan Rumah Duta Revolusi Mental dengan tujuan

pegawainya. Untuk melihat pencapaian tujuan tersebut, peneliti akan menganalisis dari beberapa faktor, yaitu:

- 1) Proses Perumusan Tujuan Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental
- 2) Upaya Optimalisasi Tujuan Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental

b. Integrasi

Keterlibatan organisasi lain, koordinasi dan komunikasi antar sesama pegawai Rumah Duta Revolusi Mental dan stakeholders eksternal dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Untuk mendukung kelancaran koordinasi, integrasi dikaji melalui

- 1) Pembagian tugas dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan di lingkungan internal dan eksternal Rumah Duta Revolusi Mental.
- 2) Proses pelaksanaan sosialisasi program Rumah Duta Revolusi Mental.
- 3) Prosedur kegiatan dan pelaksanaan program Rumah Duta Revolusi Mental

c. Adaptasi

Rumah Duta Revolusi Mental harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan yang terjadi. RDRM harus mampu menyelaraskan diri secara tanggap dan cakap pada perubahan lingkungan eksternal sehingga memiliki dampak yang

positif terhadap kinerjanya. Diperlukan suatu strategi yang adaptif untuk menghadapi perubahan secara inovatif dari lingkungan eksternal yang semakin kompleks. Untuk mengkaji adaptasi organisasi RDRM dapat diukur dari:

- 1) Upaya yang dilakukan RDRM untuk pelatihan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan pegawai Rumah Duta Revolusi Mental.
- 2) Ketersediaan fasilitas di Rumah Duta Revolusi Mental untuk menunjang layanan Rumah Duta Revolusi Mental dan peningkatan kemampuan pegawai Rumah Duta Revolusi Mental.
- 3) Inovasi yang dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang dapat berupa faktor penghambat dan pendukung efektivitas organisasi. Terdapat empat ciri faktor pengaruh efektivitas organisasi, yaitu:

a. Ciri Organisasi

Faktor efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dilihat dari bagaimana kemampuan RDRM dalam menetapkan dan mengelola struktur organisasi serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai kegiatan.

- 1) Tingkat partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan
- 2) Kesesuaian antara jumlah pegawai dengan beban tugas yang diemban RDRM
- 3) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap regulasi dan prosedur di RDRM
- 4) Pemanfaatan teknologi untuk menunjang kegiatan RDRM

b. Ciri Lingkungan

Efektivitas organisasi diukur dari beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi yaitu:

- 1) Tantangan Eksternal dan Internal Rumah Duta Revolusi Mental
- 2) Tingkat kesesuaian antara kondisi lingkungan internal RDRM dengan kondisi lingkungan yang diharapkan pegawai RDRM

c. Ciri Pekerja

Efektivitas organisasi diukur dari beberapa faktor yang memengaruhi pekerja Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental yaitu:

- 1) Inisiatif dan ketanggapan pegawai dalam merespon laporan masyarakat
- 2) Kompetensi yang harus dimiliki pegawai dalam menangani korban kasus kekerasan dan bullying pada anak sesuai jenjang pendidikan
- 3) Keterikatan pada organisasi dan motivasi pegawai Rumah Duta Revolusi Mental

d. Praktik dan Kemampuan Manajemen

Efektivitas organisasi diukur dari beberapa faktor yang memengaruhi praktik dan kemampuan manajemen Rumah Duta Revolusi Mental yaitu:

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Rumah Duta Revolusi Mental
- (2) Komunikasi eksternal dan internal Rumah Duta Revolusi Mental
- (3) Kepemimpinan dan pengambilan keputusan di Rumah Duta Revolusi Mental

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Menurut Sugiyono (2015:18), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada hakikat postpositivis yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah tidak mungkin sepenuhnya objektif atau murni. Kualitatif yang menyelidiki kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan melibatkan teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan fenomena atau kejadian yang diamati tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel. Penelitian ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam karakteristik suatu fenomena, situasi, atau populasi tertentu.

Dengan menggunakan kualitatif deskriptif, desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh keadaan dan fenomena sosial melalui observasi dengan mengumpulkan

informasi yang banyak mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berusaha memberikan gambaran yang akurat secara rinci, detail, dan mendalam mengenai Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau tertulis.

1.9.2 Situs Penelitian

Lokus Penelitian merujuk pada tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian menjadi salah satu sumber dalam mendapatkan informasi dan data yang berguna dalam penelitian mencakup permasalahan penelitian dan sasaran (Sugiyono, 2015:13). Lokasi penelitian ini berada di Kota Semarang dengan memfokuskan pada Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang yang beralamat di Jl. Simongan Raya No. 49 Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai tempat dimana penelitian akan dijalankan. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu karena Rumah Duta Revolusi Mental lokasi relevan dengan konteks penelitian yang dilakukan mengenai lembaga khusus atau penyelenggara penanganan kekerasan dan *bullying* serta ditemukan permasalahan yaitu belum efektifnya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan *bullying* anak di Kota Semarang yang berkaitan dengan terbatasnya jumlah kasus pegawai.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia, kegiatan, dan objek yang dapat dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek penelitian dapat disebut sebagai informan atau narasumber yang memberikan keterangan dan data terkait topik yang diteliti. Subjek penelitian yang dipilih harus memahami dan dapat memberikan keterangan terhadap kondisi, lokasi, dan isu yang dikaji. Teknik pemilihan informan penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu metode pemilihan sumber data dengan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Ketika memilih informan yang terlibat dalam penelitian, kelompok subjek dalam *purposive sampling* dipilih berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian peneliti sendiri.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih narasumber yang didasarkan atas karakteristik yang dibutuhkan peneliti yaitu kompeten dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sehingga mengetahui dan memahami bahasan yang diteliti, informan yang terlibat secara aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan *bullying* pada anak di Kota Semarang, dan memiliki andil dalam pengelolaan penyelenggaraan setiap kegiatan Rumah Duta Revolusi Mental. Hasil dari wawancara yang didukung dengan observasi dan dokumentasi disajikan dalam bentuk penjelasan narasi. Narasumber berikut merupakan subjek penelitian:

1. Penyusun Bantuan Hukum Rumah Duta dan Revolusi Mental
2. Konselor Psikologi Rumah Duta dan Revolusi Mental

3. Staff Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Staff Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang

1.9.4 Sumber Data

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif sehingga jenis data atau informasi yang tersaji didominasi dengan bentuk tulisan atau sekumpulan kata yang menggambarkan fenomena dan memberikan informasi dipadukan dengan table dan grafik. Menurut Sugiono (2015:62), sumber data diklasifikasi menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh/diambil langsung dari sumbernya (subyek penelitian) melalui tanya jawab atau wawancara dengan narasumber penelitian. Data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu metode wawancara kepada beberapa informan atau narasumber dengan kajian penelitian di dalam ruang lingkup Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang, seperti wawancara kepada beberapa informan, observasi langsung ke lapangan, dan mendokumentasikan melalui gambar, catatan dan rekaman suara selama proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memungkinkan secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, dengan kata lain

sekunder berasal dari data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder penelitian ini dikutip dari internet, jurnal hasil studi, artikel, data regulasi pemerintah yang resmi, BPS Jawa Tengah dan Kota Semarang, SIMFONI, ASIK PAK, website Pemerintah Kota Semarang, website Dinas Pendidikan, website Rumah Duta Revolusi Mental dan Instagram Rumah Duta Revolusi Mental.

1.9.5 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data adalah tahapan terpenting dalam penelitian karena mencari dan memperoleh data adalah tujuan utama penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan metodologi yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, beberapa metodologi dalam pengumpulan data yang sesuai digunakan, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg yaitu dua orang yang saling bertukar informasi dalam sebuah pertemuan untuk memperoleh informasi dan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan sehingga makna dalam suatu topik tertentu dapat dipahami secara jelas. (Sugiono, 2015: 231-232). Peneliti melakukan wawancara semiterbuka yang mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi memberikan pertanyaan tambahan sesuai jawaban narasumber kepada beberapa informan yang memahami manajemen Lembaga Penyelenggara RDRM dan terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan *bullying* pada anak di Kota Semarang.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204), observasi adalah proses kegiatan pengamatan dalam penelitian terhadap suatu objek secara sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau data. Dalam observasi, seseorang secara aktif memperhatikan dan mencatat perilaku, kejadian, atau karakteristik dari subjek yang diamati. Peneliti melakukan observasi melalui pengamatan lapangan di Rumah Duta Revolusi Mental. Tujuan dari observasi yang dilakukan adalah untuk memahami, menggambarkan, atau menganalisis suatu fenomena atau objek secara objektif dan sistematis.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan data kualitatif dengan mencermati dan menganalisis catatan atau dokumen mengenai suatu topik, baik dari subjeknya maupun dari individu lain. (Sugiono, 2015: 240). Lakukan identifikasi isi dengan terlebih dahulu melalui pemeriksaan isi data sekunder, mencatat informasi tersebut dalam formulir pencatatan dokumen, dan kemudian menafsirkan informasi tersebut selaras dengan isu-isu yang dikaji. Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengulas kembali literature atau dokumen serta mengabadikan dalam bentuk gambar sesuai dengan topik yang dibahas.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *literature review* adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan

dan terkait dengan topik penelitian atau kajian tertentu (Sugiyono, 2015:291). Studi literatur yang diperoleh menjadi landasan teori penelitian ini dan memberikan wawasan tentang Efektivitas Rumah Duta Revolusi Mental. Proses pengumpulan informasi penelitian ini melalui artikel jurnal penelitian terdahulu, buku Manajemen Publik, Administrasi Publik, Efektivitas Organisasi, Metodologi Penelitian, Organisasi, dan dokumen lainnya seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Walikota Semarang, Peraturan Menteri.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiono (2015:243), teknik analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi dari observasi ke lapangan, wawancara, dan sumber data lainnya yang dapat dipahami dengan mudah dan orang lain dapat memperoleh manfaat dari temuannya. Ada tiga aliran aktivitas yang dilakukan secara bersamaan yang membentuk analisis ini, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan serangkaian proses menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan, dan mengatur data akibatnya kesimpulan akhir dapat dibuat dan diverifikasi. Terdapat beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data, antara lain ringkasan, pengkodean, penelusuran tema, pengelompokan, partisi, dan pembuatan memo. Peneliti mereduksi data dan informasi dari narasumber Dinas Pendidikan dan Lembaga Penyelenggara RDRM dengan tujuan untuk menyederhanakan data melalui seleksi ketat, ringkasan atau

deskripsi singkat, dan mengorganisasikannya ke dalam pola tunggal yang lebih komprehensif.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman mengungkapkan, penyajian data adalah sekumpulan data terorganisir yang memungkinkan terjadinya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman meyakini penyajian data yang lebih baik termasuk berbagai jenis grafik, matriks, bagan, dan jaringan merupakan metode utama untuk mencapai analisis kualitatif yang valid. Tabel data, bagan, dan gambar pelengkap disajikan dalam penelitian ini sebagai upaya penggabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang lengkap.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles & Huberman merupakan proses terakhir dalam penelitian, namun dipahami pula bahwa verifikasi kesimpulan dilakukan saat tengah melakukan penelitian. Penting untuk mengevaluasi validitas yakni kebenaran, kesesuaian, dan kekokohan penafsiran yang muncul dari fakta lain. Guna kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, kesimpulan akhir harus divalidasi dan dilakukan selama tahap pengumpulan data.

1.9.7 Kualitas Data atau Validasi Data

Validitas data dikaji melalui perbandingan antara hasil yang ditulis dengan situasi sesungguhnya di lapangan menggunakan pengecekan standar tertentu seperti kebenaran dan ketegasan. Teknik triangulasi data merupakan

salah satu metode yang dalam mengkaji kualitas data. Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah suatu teknik untuk memverifikasi kebenaran data dengan cara mengecek dan membandingkannya dengan sesuatu selain data itu sendiri. Pada hakikatnya triangulasi adalah suatu metode yang didasarkan pada pandangan dunia fenomenologis yang multiperspektif, artinya diperlukan beberapa sudut pandang untuk mendapatkan hasil yang benar. Triangulasi data terdiri dari triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data menggunakan sumber-sumber yang berbeda, triangulasi teknik yaitu mengeksplorasi data sejenis dengan menggunakan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu yang dipilih untuk mengeksplorasi data dalam kondisi dan rentang waktu yang tidak sama.

Triangulasi sumber data dan triangulasi teknik adalah metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan menggunakan metodologi yang berbeda melalui dalam pengumpulan data dari beberapa sumber yang berbeda. Peneliti melibatkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian catatan. Dengan menggunakan metode dan sumber yang berbeda, peneliti dapat memperoleh sudut pandang yang beragam dan mendalam terhadap fenomena kekerasan dan *bullying* pada anak di Kota Semarang.